

**PELAKSANAAN FUNGSI REKRUITMEN CALEG
PADA PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Partai Golkar di Kabupaten Takalar pada Pemilu 2009)**

**ALAMSYAH
NPM: 1600209013**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

ABSTRAK

ALAMSYAH. *Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Caleg pada Partai Politik (Studi Kasus Partai Golkar di Kabupaten Takalar Pemilu 2009)* (dibimbing oleh Maria E. Pandu dan H. M. Darwis)

Tesis ini disusun untuk mendeskripsikan mekanisme perekrutan caleg Partai Golkar Kabupaten Takalar pada Pemilu legislatif 2009 dan bagaimana hubungan caleg dengan partai saat kampanye sedang berlangsung. Selain itu, bentuk keterlibatan caleg juga dapat dilihat setelah pemilu, baik caleg yang terpilih maupun yang tidak terpilih.

Metode yang digunakan adalah observasi dengan wawancara mendalam dengan informan untuk mendapatkan data dan indikasi penelitian. Data yang telah ditarik secara purposif kemudian analisis secara deskriptif untuk menemukan hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Dalam perekrutan caleg Partai Golkar Kabupaten Takalar pada Pemilu 2009, masih ada kesenjangan antara aturan mekanisme perekrutan dan penentuan caleg dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Penentuan caleg ditempuh dengan pola hubungan secara subjektivitas dan objektivitas. Akan tetapi, nuansa subjektivitasnya lebih besar daripada objektivitasnya. Bentuk keterlibatan caleg terpilih yang bukan berasal dari anggota atau pengurus partai lebih banyak yang tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan partai. Sementara, caleg tidak terpilih yang berasal dari pengurus partai masih ada beberapa tetap aktif namun sebagian sudah terlanjur kecewa sehingga jarang lagi terlibat dalam kegiatan partai. Oleh karena itu, pelaksanaan mekanisme perekrutan dan penentuan caleg secara menyeluruh dan tepat sangat memengaruhi kualitas dan loyalitas kader suatu partai politik.

ABSTRACT

ALAMSYAH. *Implementation of Function of Legislative Candidate Recruitment on Political Parties (Case Study of the Golkar Party in Takalar Regency at General Election 2009)* (supervised by Maria E. Pandu and H.M. Darwis)

The thesis is compiled to describe the mechanism of recruitment of the Golkar Party Legislative Candidates of Takalar Regency in 2009 Legislative General Elections and the relationship between the candidates with the party during the campaign is underway. In addition, the form of legislative involvement can also be seen after the election, both candidates are elected or not elected.

The method used was observation with in-depth interviews with informants to obtain data and indications of research. The data has been drawn purposively and then analyzed descriptively to find the results of research that has been formulated in the statement of the problem.

In fact, there is still gap between the rules of recruitment mechanism and the determination of candidates with a real condition that occurs in the field in recruiting of Golkar Party's Legislative Candidate of Takalar Regency in the 2009 General Elections. Determination of candidates is done by the pattern of relationships in subjectivity and objectivity. However, the nuances subjectivity is greater than objectivity. The involvement of elected candidates who are not comes from party's members or officials are mostly not active in party activities. Meanwhile, candidates who are not elected from party officials there are still some remains active, but the majority had already disappointed, so rarely involved in party activities. Therefore, the implementations mechanisms of recruitment and determination of candidates thoroughly and appropriately are greatly affect the quality and loyalty of political party cadres.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan setinggi-tingginya ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya karena hasil penelitian tesis ini dapat disusun dengan baik. Penyusunan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Setiap perjalanan selalu menemukan hal-hal yang menyenangkan dan menyedihkan. Namun, hal itu tetap harus disyukuri karena semuanya merupakan proses yang mesti dilalui untuk mencapai satu kebijaksanaan dan kedewasaan, terutama kebijaksanaan mengenai hal-hal yang ilmiah. Selain itu, keuletan dan kesabaran memang harus hadir bersamaan dalam setiap langkah maju menuju kesuksesan. Penulis yakin bahwa penyusunan tesis ini merupakan wadah untuk mengaplikasikan dan memadukan semua ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan berlangsung di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Berkat masukan dan kritikan konstruktif dari mereka, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan membesarkan sehingga saya dapat menjadi seperti saat ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada istri saya, Hj. Widya Astuti, yang telah merestui untuk melanjutkan studi di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Maria E. Pandu, M.A. sebagai pembimbing pertama dan Dr. H. M. Darwis, D.P.S., M.A. sebagai pembimbing kedua yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama menyusun tesis ini. Berkat masukan dan kritikan-kritikan konstruktif dari beliau, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Selama proses penyusunan tesis ini berlangsung, penulis juga banyak menerima bantuan, motivasi, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang tersebut di bawah ini.

1. Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Syaifullah Cangara, M.Si. selaku Ketua Program Studi Sosiologi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Dosen-dosen Fisip Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Para responden yang telah bersedia memberikan komentar untuk kelancaran penelitian tesis ini.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang luput dari perhatian. Oleh karena itu, saran dan kritikan-kritikan yang konstruktif sangat dibutuhkan dari pembaca untuk penulisan yang lebih baik lagi. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Makassar, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori dan Konsep	9
1. Partai Politik Sebagai Organisasi	9
2. Sosialisasi Politik Sebagai Hubungan Sosial	23
3. Prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer	33
4. Teori Struktural Fungsional	36
B. Penelitian Relevan	42
C. Kerangka Pikir	43
D. Definisi Operasional	44

III. METODE PENELITIAN	46
A. Tipe dan Rancangan Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Populasi dan Teknik Sampel	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	50
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
A. Gambaran Partai Golkar	51
1. Umum	51
2. Orientasi dan Kualitas Dasar Calon	52
3. Aspek-aspek Penilaian Calon	53
4. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	59
5. Mencerminkan Semangat Reformasi	59
B. Daftar Caleg Partai Golkar Kabupaten Takalar Pemilu 2009	60
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Mekanisme Rekrutmen Caleg Pemilu 2009 pada Partai Golkar Kabupaten Takalar	64
B. Hubungan Caleg dengan Partai Golkar Saat Berlangsung Kampanye Pemilu 2009	76
C. Bentuk Keterlibatan Caleg Terpilih dan Tidak Terpilih Demi Pencapaian Program dan Tujuan Partai	89
D. Konsep Ideal Partai Golkar dalam Membangun Kader	98
VI. PENUTUP	100

A. Simpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Fungsi Input dan Output	39
Tabel 3.1: Usulan Proporsi Calon Berdasarkan Kelompk Usia	58
Tabel 4.1: Susunan Caleg Partai Golkar Takalar Dapil I	60
Tabel 4.2: Susunan Caleg Partai Golkar Takalar Dapil II	61
Tabel 4.3: Susunan Caleg Partai Golkar Takalar Dapil III	62
Tabel 5.1: Pembobotan Aspek Pengabdian	69
Tabel 5.2: Pembobotan Aspek, Prestasi, Pengalaman, dan Pengaruh	70
Tabel 5.3: Pembobotan Aspek Penugasan Fungsionaris	70
Tabel 5.4: Bobot Skor Pengabdian	72
Tabel 5.5: Bobot Skor Pendidikan	72
Tabel 5.6: Tahapan Kegiatan Partai	72
Tabel 5.7: Matriks Rekrutmen Caleg	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, tujuan, dan fungsi serta nilai yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Dalam perundang-undangan di Indonesia, partai politik diartikan sebagai suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Pada prinsipnya, partai politik merupakan salah satu institusi inti pelaksana demokrasi modern, yang mana demokrasi modern mengandalkan sebuah sistem keterwakilan, baik itu keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seseorang atau sesuatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama rakyat atau suatu kelompok yang lebih besar sehingga anggota DPR pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik.

Pemilihan umum merupakan bentuk legitimasi yang diberikan rakyat kepada partai politik maupun perseorangan untuk mewakilinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada pemilu yang berlangsung tahun 2009 lalu yang menggunakan landasan yuridis UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dimana ada ketentuan BPP 30% untuk caleg terpilih yang dimaksudkan demi upaya penguatan demokrasi di Indonesia, sehingga pasca masa transisi demokrasi, Indonesia kemudian melangkah ke tahapan konsolidasi demokrasi. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, ada beberapa hal yang berbeda dari pemilu yang sebelumnya yaitu terkait dengan penentuan calon. Jadi, di sebuah partai politik yang memperoleh kursi parlemen adalah didasarkan pada sistem suara terbanyak. Penempatan suatu wakil rakyat di parlemen tidak lagi menggunakan sistem nomor urut, sehingga dapat dipastikan nomor urut bukanlah jaminan lolos atau tidaknya caleg dari sebuah partai.

Penggunaan suara terbanyak ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-IV/2008 yang membatalkan ketentuan Pasal 214 Huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang dipandang bertentangan dengan prinsip konstitusi tentang kedaulatan rakyat. Putusan MK yang hadir pada saat pemilu legislatif akan dilaksanakan membawa pro-kontra karena dinilai banyak melanggar proses politik yang telah lama berlaku di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan diberlakukannya ketetapan Mahkamah Konstitusi, maka memunculkan perubahan model kampanye, baik oleh Partai Politik maupun oleh Calon Anggota Legislatif. Partai Politik, sebagai sebuah organisasi partai, tentu akan mengkampanyekan visi dan misi yang akan diperjuangkan. Namun, ada yang menarik pada Pemilu 2009, dimana eksistensi kampanye Caleg, dalam komunitas masyarakat langsung, melebihi eksistensi kampanye Partainya. Hal ini disebabkan oleh penentuan anggota

legislatif berdasarkan suara terbanyak, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Suasana ini tidak ditemukan pada kampanye Pemilu 2004. Seorang Caleg dituntut untuk mengkampanyekan 2 hal. *Pertama*, mengkampanyekan Partai yang mengusung Caleg. *Kedua*, mengkampanyekan pribadi Caleg tersebut. Caleg dipacu untuk memperkenalkan dirinya kepada pemilih, agar memilih dirinya, di samping memilih Partainya, pada pemungutan suara. Namun, dapat dipastikan, para Caleg cenderung mengedepankan kampanye pribadinya dari pada mengkampanyekan Partainya. Model kampanye seperti ini tentu akan mengarahkan pemilih pada pemilihan caleg. Beberapa Partai juga tampaknya menyadari hal ini, dan bahkan mengharapkan hal ini. Sehingga partai mempersiapkan orang-orang yang populer di masyarakat sebagai caleg dari partai tersebut.

Dalam Pemilu Legislatif, kondisi ini dirasa baru oleh para pemilih. Namun, mungkin kondisinya tidak jauh beda dengan Pilkades, Pilkada, atau Pilpres. Jumlah aktor (Kandidat) lah yang membedakan antara Pilkades, Pilkada, Pilpres, dengan Pemilu Legislatif 2009. Pada Pilkades, jumlah aktor/ kandidat, mungkin hanya berkisar antara 2 sampai 5 kandidat. Di Pilkada, jumlah aktor/ kandidat hanya berkisar 2 sampai 5 pasang. Begitupun dengan Pilpres. Namun, jumlah aktor/ kandidat dalam Pemilu Legislatif 2009, bisa mencapai 50 bahkan ratusan orang lebih per Daerah Pemilihan. Jumlah aktor yang banyak dalam Pemilu Legislatif 2009, serta model kampanye yang dilakukan, memunculkan tekanan yang kuat pada perubahan cara pandang pemilih, dari memilih Partai menjadi memilih Caleg.

Setelah melihat fenomena di atas, Partai Golkar sebagai partai politik yang menjadi pemenang pemilu pada tahun 2004 tentunya memiliki strategi demi mempertahankan prestasi tersebut. Pertarungan memperebutkan kursi parlemen melalui Pemilu 2009 tidak semata berdimensi kemampuan individual calon dan

peranan tokoh yang tampil di daerah pemilihan bersangkutan, tetapi juga berhubungan dengan peranan elit partai Golkar itu sendiri diseluruh level/jenjang kepengurusan dalam menentukan figur-figur yang akan ditawarkan kepada pemilih.

Pada Tingkat nasional Partai Golkar yang memiliki orientasi pengelolaan di tingkat kebijakan, maka jarak atas calon wakil di parlemen dengan rakyat dan sekaligus daerah pemilihannya mengharuskan Partai Golkar sebagai organisasi yang mempertahankan eksistensi dan loyalitas kader, anggota dan simpatisannya

Teknis pengelolaan organisasi partai politik secara umum tidak terkecuali Partai Golkar berusaha melakukan pengisian jabatan organisasi berdasarkan fundamental kiprah para kadernya di tempat asal masing-masing, dimana sering kita temukan keputusan akhir atas proses politik pengusulannya sebagai calon anggota DPRD, dapat berbeda dibandingkan dengan tujuan awal yang dibangun dari mekanisme pengkaderan tersebut sebagai pola komunikasi yang dibangun dalam sebuah organisasi.

Peranan elit partai Golkar yang sangat besar terhadap pola hubungan komunikasi dengan kadernya termasuk proses penyusunan daftar caleg, pada pemilu 2009 yang diperhadapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 214 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Substansi perubahan yang dihadirkan oleh Putusan MK tersebut dalam bentuk perolehan suara terbanyak sebagai dasar penentuan caleg terpilih.

Pasca keluarnya putusan MK tersebut, persaingan antarcaleg tidak lagi sebatas pada antarpantai, tetapi juga diwarnai oleh antarcaleg dalam satu partai yang sama. Bahkan, persaingan ini bukan tidak mungkin hadir dalam internal Partai Golkar khususnya pada kepengurusan Partai Golkar di Tingkat Daerah. Apabila

partai Golkar tidak mampu mengelola persaingan antarcalegnya tersebut serta tidak mampu membangun hubungan komunikasi yang efektif maka akan menimbulkan rasa saling curiga satu sama lain, konflik antarcaleg yang berakibat pada gagalnya pencapaian target, program dan tujuan partai di setiap jenjang kepengurusan.

Selanjutnya adalah setelah pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif Tahun 2009 tentunya setiap partai memiliki program kerja dan tujuan yang akan dicapai sebagai prinsip dasar dari Organisasi, proses pencapaian target dan program tersebut haruslah melibatkan segala potensi seluruh kader dan anggota partai. Caleg sebagai kader utama partai seharusnya menjadi pendorong utama dari program-program kepartaian dengan tidak melihat apakah caleg tersebut terpilih sebagai anggota legislatif ataukah tidak. Caleg dianggap sebagai kader utama partai karena dari sekian banyak pengurus dan kader partai yang ada, merekalah yang dipercaya mewakili partai untuk berkompetisi menjadi anggota legislatif. Namun, faktanya kadang tidak semua caleg mempertahankan produktivitasnya kepada partai setelah pemilu, apalagi kalau caleg tersebut gagal terpilih sebagai anggota legislatif. Lebih parah lagi, diantara mereka bahkan ada yang pindah partai akibat kekecewaannya dan tidak lagi mempertimbangkan hubungan yang terjalin lama dengan partainya selama ini. Ini adalah salah satu gambaran dari begitu rumitnya pola hubungan partai dengan calegnya dalam membangun sistem kepartaian yang baik di tengah jalan menuju demokrasi yang dicita-citakan.

Menyimak kondisi objektif tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam tentang Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Caleg Pada Partai Politik, studi kasus Partai Golkar Kabupaten Takalar Pemilu 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan permasalahan yang menjadi perhatian dan fokus kajian adalah sebagai berikut ini.

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen caleg Pemilu 2009 pada Partai Golkar Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana hubungan caleg dengan Partai Golkar pada saat berlangsung kampanye legislatif 2009?
3. Bagaimana bentuk keterlibatan caleg terpilih dan caleg tidak terpilih pada pemilu legislatif tahun 2009 demi pencapaian program dan tujuan Partai Golkar Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis mekanisme rekrutmen caleg Pemilu 2009 pada Partai Golkar Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui hubungan caleg dengan partai Partai Golkar pada saat berlangsung kampanye pemilu legislative 2009.
3. Untuk mengetahui bentuk pelibatan caleg terpilih dan caleg tidak terpilih pada pemilu legislatif tahun 2009 demi pencapaian program dan tujuan Partai Golkar Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan berguna untuk hal-hal sebagai berikut ini.

1. Sebagai sumber informasi dan pertimbangan bagi pihak yang ingin memperdalam kajian ilmu pengetahuan tentang fungsi rekrutmen caleg Pemilu 2009, khususnya bagi Partai Golkar Kabupaten Takalar.
2. Sebagai input bagi para pengurus/elit Partai Golkar di Kabupaten Takalar dalam mengelola organisasi partai politik.
3. Sebagai kajian ilmiah referensi tentang fungsi rekrutmen caleg Pemilu 2009 dalam rangka mewujudkan iklim demokrasi yang sehat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori dan Konsep

1. Partai Politik Sebagai Organisasi

a. Definisi Partai Politik

Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan visi dan misi tersebut, partai politik memiliki program-program politik yang dilakukan dengan bersama-sama dari setiap anggotanya, serta memiliki tujuan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan.

Budiardjo (2004) mengemukakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Definisi di atas senada dengan pendapat R.H. Soltau (dalam Budiardjo 2004) bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Pengertian tersebut juga didukung definisi oleh Gettell (dalam Widagdo, 1999) yang mengungkapkan pendapatnya tentang partai politik yaitu:

“ A political party consists of a group of citizens, more or less organized, who act as a political unit and who and, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out the general politics”.

(“Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang mempunyai kekuasaan memilih, bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”).

Sementara itu, J.A.Corry and Abraham H.J. (dalam Haryanto,1948) mengungkapkan pendapatnya tentang partai politik merupakan suatu perkumpulan yang bermaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan menempatkan para anggotanya pada jabatan-jabatan pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas, partai politik mencakup kumpulan orang-orang yang terorganisir secara teratur dan memiliki persamaan tujuan, serta cita-cita untuk memperoleh kekuasaan pemerintah, dengan cara mengawasi dan melaksanakan kebijakan umum yang mereka aspirasikan. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada

fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan yang diambil dalam pemerintahan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, biasanya partai politik ikut serta dalam perumusan kebijakan, yaitu dengan cara mendudukkan sebagian anggotanya pada lembaga pemerintahan.

Sementara, menurut Surbakti (1992), partai politik didefinisikan sebagai kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Pendapat di atas senada pula dengan pendapat Kantaprawira yang mendefinisikan partai politik sebagai organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang panjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (*power endeavor*).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka partai politik tidak hanya kumpulan orang-orang yang terorganisir, tetapi di dalamnya terdapat pula tugas dan fungsi, ideologi-ideologi, program-program, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk menguasai dan merebut kekuasaan politik. Beberapa pendapat di atas, berbeda dengan pendapat Neuman (dalam Budiardjo, 1998) yang mengemukakan definisi partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan

perhatiannya pada kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan masyarakat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengikatnya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Pengertian ini mengungkapkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi artikulasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kepentingan politik yaitu menguasai pemerintah dan bersaing untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi, partai politik di sini merupakan penghubung kekuasaan antara pemerintah dengan masyarakat, tentunya sebagai media penghubung dan penampung aspirasi masyarakat.

Jadi, partai politik tidak hanya sekadar kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan ideologi dan tujuan yang sama, tetapi harus bersedia memperjuangkan kebenaran, terutama dalam melaksanakan aktivitas politik dalam suatu negara.

Pengertian partai politik di atas senada dengan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 pasal 1 (1) adalah : Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Asal-usul Partai Politik

Surbakti (1992) mengemukakan tiga teori tentang asal-usul partai politik.

a. Teori Kelembagaan

Teori ini mengatakan bahwa partai politik ada karena dibentuk oleh kalangan legislatif (dan atau eksekutif) karena kedua anggota lembaga tersebut ingin mengadakan kontak dengan masyarakat sehubungan dengan pengangkatannya, agar tercipta hubungan dan memperoleh dukungan dari masyarakat maka terbentuklah partai politik. Ketika partai politik bentukan pemerintah dianggap tidak bisa menampung lagi aspirasi masyarakat, maka pemimpin kecil masyarakat berusaha membentuk partai-partai lain.

b. Teori Situasi Historis

Teori ini menjelaskan tentang krisis situasi historis yang terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari struktur masyarakat tradisional ke arah struktur masyarakat modern. Pada situasi ini, terjadi berbagai perubahan yang menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Partai politik lahir sebagai upaya dari sistem politik mengatasi krisis yang terjadi. Partai politik diharapkan dapat berakar kuat dalam masyarakat untuk dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk pola hubungan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Terbukanya partai bagi setiap anggota masyarakat dari berbagai golongan mengharapkan partai politik dapat menjadi alat integrasi bangsa. Dengan adanya partai politik, masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

c. Teori Pembangunan

Menurut teori ini, partai politik lahir sebagai akibat dari adanya proses modernisasi sosial-ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi,

pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Maka lahirlah partai politik, dengan harapan agar organisasi politik tersebut mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi yang ada.

c. Tujuan Partai Politik

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut akan menjadi penuntun serta pedoman ketika organisasi tersebut berjalan. Dalam mencapai tujuan tersebut, harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh orang-orang yang menjalankan organisasi sehingga dalam pencapaian tujuan tersebut dapat membuahkan hasil yang sempurna. Begitu pula dengan partai politik yang memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh kekuasaan di dalam pemerintahan.

Menurut Kantaprawira (1988) bahwa tujuan partai politik sangat luas, antara lain meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut ini.

- a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau *output* pada umumnya.
- b. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu, terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik yang bersangkutan).
- c. Berperan untuk memandu tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Apabila dilihat dari tujuan partai politik tersebut, maka terlihat jelas betapa besarnya peranan dan partisipasi partai politik dalam sektor pemerintahan, terutama dalam melaksanakan pengawasan, pengambilan keputusan, penafsir kepentingan, dan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Jadi, setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat terlepas dari campur tangan partai politik. Dalam melaksanakan tujuannya, partai politik mengutuskan beberapa orang wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif, tentunya melalui mekanisme pemilihan umum. Sedangkan jumlah wakil utusan tersebut tergantung dari perolehan suara dalam pemilu.

d. Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik berbadan hukum yang memiliki beberapa fungsi penting yang harus dapat dilaksanakan. Melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya tersebut, dapat dilihat bagaimana kinerja partai yang bersangkutan. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu.

Menurut Sukarna (1981) ada dua cara yang dipergunakan partai politik dalam memperoleh kekuasaan. Cara tersebut adalah sebagai berikut ini.

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan yang sah dengan tujuan bahwa dalam pemilihan umum memperoleh suara mayoritas dalam badan legislatif.
- b. Bekerja secara tidak sah atau *subversif* untuk memperoleh kekuasaan tertinggi dalam negara, yaitu melalui revolusi atau *coup d'état*.

Selain fungsi utamanya tersebut, partai politik juga melaksanakan beberapa fungsi lain, menurut Koirudin dalam bukunya *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* terdapat lima fungsi lain yang harus dilaksanakan oleh partai politik. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut ini.

a. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses peng-*input*-an berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

b. Fungsi Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan publik.

c. Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu negara.

d. Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Partai politik seharusnya melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat.

e. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, yakni mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Yang penting dalam komunikasi politik adalah bagaimana partai politik dapat mengelola komunikasi politik di internal partai mereka sendiri, kemudian komunikasi politik dengan pihak luar.

Ketika melaksanakan fungsi-fungsinya tersebut partai politik melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi seleksi calon-calon, berkampanye serta menjalankan pemerintahan eksekutif maupun legislatif.

e. Karakteristik dan Klasifikasi Partai Politik

Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dari organisasi politik lainnya. Lapalombara dan Weiner (dalam Surbakti,1992) mengemukakan beberapa ciri partai politik yaitu:

a. *Berakar dalam masyarakat lokal*

Partai politik dibentuk atas keinginan masyarakat sebagai penyalur aspirasinya, adanya legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah partai politik merupakan hal yang penting. Selain itu partai politik juga harus memiliki cabang di daerah, agar dapat mengakar dalam masyarakat lokal karena jika tidak begitu bukan merupakan partai politik

b. *Melakukan kegiatan terus menerus*

Kegiatan yang dilakukan oleh partai politik haruslah berkesinambungan, di mana masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup pemimpinnya.

c. *Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan*

Partai politik bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan dengan maksud agar dapat melaksanakan apa yang telah menjadi programnya.

d. *Ikut serta dalam pemilihan umum*

Untuk dapat menempatkan orang-orangnya dalam lembaga legislatif, partai politik di negara demokratis turut serta dalam pemilihan umum.

Berdasarkan ciri-ciri partai politik di atas, maka partai politik harus memiliki kepengurusan yang tersebar di setiap daerah, sehingga betul-betul mengakar pada masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan yang dilakukan partai politik tentunya harus terlaksana secara terus-menerus, sehingga keberadaan partai politik tersebut dapat bertahan dengan lama. Ciri yang paling menonjol dalam partai politik adalah berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan seluas-luasnya dalam pemerintahan, yaitu melalui proses pemilihan umum

Setiap partai politik memiliki asas dan orientasi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Semakin banyak kepentingan politik yang diusung oleh partai politik dalam suatu negara, maka ini mencerminkan bahwa kepentingan masyarakat yang ada di negara tersebut beragam. Untuk melihat banyaknya kepentingan dalam suatu negara, maka dapat dilihat dari asas dan orientasi yang dianut dari masing-masing partai politik dalam negara tersebut.

Surbakti (1992) mengklasifikasi asas dan orientasi partai politik menjadi tiga tipe. Tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut ini.

a. Partai politik pragmatis

Suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.

b. Partai politik doktriner

Suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi.

c. Partai politik kepentingan

Suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

Beberapa asas dan komposisi partai politik ini, dituangkan ke dalam sebuah program politik yang nyata, di mana program-program tersebut harus dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Setiap partai politik memiliki program-program yang berbeda-beda. Hal ini merupakan penjabaran ideologi yang dianut partai tersebut. Jadi, semakin banyak kepentingan yang diusung oleh partai politik, maka ini menandakan adanya spesialisasi kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh partai politik, sehingga kepentingan-kepentingan yang diaspirasikan oleh partai politik tersebut dapat terlaksana dengan maksimal berdasarkan kepentingan masyarakat yang memilihnya.

Sedangkan berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari para pengikut-pengikutnya ataupun kader-kader yang mewakili partai tersebut dalam lembaga legislatif. Untuk itu menurut surbakti (1992); setidaknya ada dua penggolongan komposisi dan fungsi anggota partai politik. Kedua hal tersebut dapat dilihat dengan jelas di bawah ini.

- a. Partai politik massa atau lindungan: yaitu partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi setiap kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat memobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Partai ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum.

- b. Partai politik kader: yaitu suatu partai yang mengandalkan kualitas keanggotaan, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui jenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu.

Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota partai politik, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Partai Golkar termasuk dalam kategori partai massa. Hal ini terbukti bahwa Partai Golkar memiliki massa yang besar dan program-program yang dirumuskan secara umum dan fleksibel, serta para kader-kader Partai Golkar memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda. Besarnya jumlah massa Partai Golkar dapat dilihat pada pemilu umum legislatif tahun 2004, Partai Golkar berhasil memperoleh kemenangan pada urutan pertama dan Pemilu 2009 Legislatif berada pada Urutan kedua. Dilihat dari orientasi keanggotaannya partai massa terdiri dari berbagai macam aliran politik yang kemudian dituangkan ke dalam berbagai macam program-program politik yang bersifat umum, tak heran partai ini pun mengatasnamakan diri sebagai partai nasionalis yang mampu mengakomodir segala kepentingan yang berlaku di masyarakat.

2. Sosialisasi Politik Sebagai Bangunan Hubungan Sosial

Untuk dapat mengendalikan kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat dengan baik, maka partai politik harus dapat melaksanakan fungsi-fungsinya. Selain fungsi utamanya mencari dan mempertahankan kekuasaan, partai politik juga memiliki fungsi lainnya, salah satunya fungsi sosialisasi politik. Fungsi sosialisasi politik merupakan fungsi yang penting dilaksanakan karena merupakan

mata rantai di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Melalui sosialisasi politik, masyarakat dapat mengetahui sistem politiknya dan fenomena politik yang sedang terjadi.

a. Definisi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap partai politik. Melalui sosialisasi politik partai politik dapat memberitahukan identitas partainya, sekaligus membentuk image masyarakat sehingga dalam pemilihan umum partai politik dapat memperoleh dukungan dari masyarakat.

Rush dan Althoff (2002) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses oleh pengaruh dimana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik

Koirudin (2004) mengungkapkan pendapatnya tentang sosialisasi politik, yakni merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.

Definisi sosialisasi politik juga dikemukakan oleh Aberle (dalam Rahman,1998) yang menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasi (dan yang terus berlanjut) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru harus terus dipelajari.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses penyampaian atau transformasi nilai-nilai politik kepada individu-individu secara terus menerus sehingga dia akan

memberikan reaksinya terhadap fenomena politik yang terjadi. Melalui proses sosialisasi politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis, partai politik selain meneruskan atau mentransmisikan norma-norma politik dan ideologi partai (Koirudin, 1984:16), juga dapat menanamkan sekaligus mengembangkan kesadaran politik pada diri pendukung-pendukungnya.

b. Materi Sosialisasi Politik

Partai politik sebagai agen atau sarana sosialisasi politik dalam melaksanakan proses sosialisasinya memperkenalkan nilai-nilai, pengetahuan maupun sikap-sikap politik kepada masyarakat. Nilai-nilai, pengetahuan maupun sikap-sikap politik yang diajarkan partai politik merupakan materi dari sosialisasi politik, antara lain terdiri atas ideologi partai, platform partai, program-program partai maupun kandidat-kandidat partai yang akan mewakili rakyat.

a. Ideologi Partai

Secara umum, ideologi dapat dirumuskan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan mengenai cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuan (Surbakti, 1992). Ideologi yang dianut suatu partai politik dapat dilihat pada pola dan arah kebijakannya, pada pernyataan politik yang dikemukakan untuk menanggapi persoalan yang dihadapi negara-negara, pada respon yang diberikan terhadap aspirasi yang diajukan oleh kelompok dalam masyarakat, pada pola dan arah peraturan perundang-undangan yang diperjuangkan dan pada sosok dan profil orang-orang yang diusulkan dan dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Priowidodo (2003) memetakan partai-partai politik menjelang pemilu 2004 dengan memperhatikan kedekatan ideologis. Sekurangnya terdapat enam aliran ideologi partai politik di Indonesia, yaitu ideologi nasionalis (misalnya PDI-P,

Partai Golkar, PKP), islamis (moderal/inklusif, PKB, PAN-Fundamentalis/eksklusif, PKS, PBB, PSII, dll), sosialisme (PRD), kekristenan (PDS), etnik (PPD), dan profesi (PBSD, Partai Merdeka).

b. Platform Partai

Platform partai dikenal dengan janji kampanye partai. Platform partai menurut Truman adalah sebuah kontrak dengan rakyat yang mengabsahkan keberadaan politisi dalam parlemen (Koirudin, 2004). Suryadi (dalam Kompas) mengemukakan pendapatnya tentang platform partai, dimana platform partai merupakan landasan sekaligus motivasi pelembagaan fungsi partai politik.

Fungsi platform partai bagi masyarakat selain menawarkan informasi kepada anggota, simpatisan, dan masyarakat pada umumnya tentang komitmen partai mengenai sebuah kebijakan, juga membantu pemilih merangkum dan mengkristalisasi pandangan mereka tentang partai politik dan kandidat yang bertarung di bawah bendera partai. Platform merupakan pelita bagi khalayak dalam membentuk identifikasi kepartaian secara bermakna (meaningful party identification). Platform bagi partai politik hendaklah dipandang sebagai “kontrak kerja politik” bukan sekadar “alat pemikat”.

c. Program Partai

Program partai merupakan hal-hal yang ditawarkan atau yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Program-program tersebut disosialisasikan kepada masyarakat sehingga akan mendapat dukungan sebanyak mungkin.

Pada era reformasi dan untuk menghadapi pemilihan umum 2009, masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah krisis ekonomi, kesehatan, pendidikan, pengangguran, politik, dan budaya. Oleh karena itu,

partai-partai politik konstituen pemilihan umum 2009 menganggap masalah-masalah tersebut dapat menjadi program partai yang populer.

d. Kandidat-kandidat Partai

Partai politik merupakan sarana pengkaderan sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai tingkatan sifat, sikap, perilaku, dan perbuatan yang baik dengan akhlak yang bagus sebagai cerminan dari jiwanya.

Partai politik peserta pemilihan umum berperan dalam proses pencalonan anggota legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif. Menjelang pemilihan umum 2009, partai-partai politik harus bersaing menghasilkan kandidat-kandidat partai yang berkualitas, yang tidak hanya loyal terhadap partainya tetapi juga loyal pada tugas dan juga rakyatnya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan bangsa ini.

c. Mekanisme Sosialisasi Politik

Mekanisme sosialisasi politik merupakan cara atau metode yang dipakai dalam mentransmisikan elemen-elemen dari sosialisasi politik. Terdapat tiga mekanisme sosialisasi politik yang dikemukakan oleh Rush dan Alhoff (2002). Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut ini.

a. Imitasi

Merupakan peniruan (copy) terhadap tingkah laku individu-individu lain dan merupakan hal yang penting dan murni lebih banyak terjadi dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak saja, karena masa remaja dan dewasa imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, yaitu intruksi dan motivasi.

b. Instruksi

Merupakan peristiwa penjelasan diri mengenai suatu perintah yang bila tidak dilakukan akan ada sanksi dan tidak hanya terbatas pada proses belajar formal

saja. Hadirnya beberapa organisasi atau kelompok-kelompok diskusi merupakan tipe instruksi yang informal dan eksplisit sifatnya.

c. Motivasi

Merupakan dorongan jiwa, yang mendorong atau mendesak seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Le Vine motivasi adalah bentuk tingkah laku yang tepat-cocok yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (trial and error), dimana individu yang bersangkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan-tindakan sama-cocok dengan sikap-sikap dan pendapat sendiri.

Sementara itu, mekanisme penyampaian pesan dalam sosialisasi politik, menurut Ramlan Surbakti terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Indoktrinasi politik ini biasanya dilakukan pada negara yang menganut sistem komunis, tetapi dalam negara demokratis pun, bentuk indoktrinasi politik dapat dilihat dalam proses kaderisasi.

1) Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan proses dialogik antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah termasuk partai politik dan peserta didiknya dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai, norma juga simbol-simbol yang dianggap ideal dan baik (Surbakti, 1992). Pendidikan politik, selain untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat, diharapkan pula dapat mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Masyarakat memerlukan pendidikan politik yang berkesinambungan karena masalah-masalah politik itu merupakan masalah yang kompleks dan seringkali berubah-ubah.

Pendidikan politik yang diberikan partai politik terhadap kader partai yang meliputi dasar, tujuan, dan program partai yang bersangkutan, dimana sifatnya

penuh subjektivitas partai yang nantinya melahirkan fanatisme partai yang berlebihan (Sukarna, 1981). Pendidikan politik dapat berupa kursus-kursus, ceramah/diskusi, penataran politik, dan lain sebagainya.

Pada negara yang sedang atau sudah berkembang yang menganut sistem multipartai seperti layaknya Indonesia, partai-partainya lebih berorientasi pada ideologi daripada program partai. Maka pendidikan politik akan banyak ditekankan pada ideologi partainya. Melalui pendidikan politik diharapkan dapat lahir para pelaku politik berkualitas, yang sadar akan perannya, mengetahui hak, dan bertanggung jawab.

2) Kaderisasi

Salah satu bentuk indoktrinasi politik dalam negara demokrasi adalah pelaksanaan kaderisasi, walaupun tidak secara jelas proses sepihak, tetapi dalam kaderisasi seseorang harus menerima nilai dan simbol-simbol tertentu yang dianggap baik oleh partai politik.

Koirudin (2004) mendefinisikan kaderisasi sebagai proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi orang secara lebih bagus. Dalam pengkaderan, terdapat dua persoalan penting, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan para pengurusnya memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara intensif di bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya. Ini semua harus dilakukan pada semua tingkatan kepengurusan partai.

2. Kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, terutama pada kaum muda. Kaum muda akan menjadi sasaran yang efektif untuk menjadi sasaran pengkaderan untuk dijadikan terdidik dan berkualitas.

Kaderisasi organisasi dalam hal ini, organisasi partai politik merupakan urat nadi organisasi. Peran dari kader partai politik adalah sangat penting, karena kepemimpinan partai politik nantinya akan sangat ditentukan oleh kualitas kader-kader yang dimilikinya, yang mana akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.

d. Sasaran Sosialisasi Politik

Proses sosialisasi politik harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga dapat mempengaruhi sasaran dari sosialisasi tersebut. Sasaran dari sosialisasi politik menurut Rush dan Althoff meliputi anak-anak, para remaja, dan orang dewasa.

Sasaran sosialisasi politik partai politik terdiri atas semua pemilih potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, yang mungkin bersedia dan mampu menjadi pendukung partai politik tertentu, dimana partai politik yang memungkinkan akan dipilih dapat memuaskan keinginan dan kebutuhannya tersebut (Widagdo, 2004). Partai politik dapat menetapkan sasaran sosialisasi politiknya pada kalangan agama, profesi, dan tokoh-tokoh tertentu.

f. Etika Politik

Etika politik adalah perkembangan filsafat di zaman pascatradisional. Dalam tulisan para filosof politik klasik: Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Marsilius dari Padua, Ibnu Khaldun, dapat ditemukan berbagai unsur etika politik, tetapi tidak secara sistemik. Dua pertanyaan etika politik di atas baru bisa muncul di ambang zaman modern, dalam rangka pemikiran zaman pencerahan, karena pencerahan

tidak lagi menerima tradisi/otoritas/agama, tetapi menentukan sendiri bentuk kenegaraan menurut ratio/nalar, secara etis.

Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil (Paul Ricoeur, 1990). Definisi etika politik membantu menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan. Pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain. Kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan, Ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. *Hidup baik bersama dan untuk orang lain* tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. *Hidup baik* tidak lain adalah cita-cita kebebasan, kesempurnaan, eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warga negara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warga negara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan kongkret kebebasan atau disebut *democratic liberties*: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

3. Tiga Prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer

Pluralisme

Pluralisme yang dimaksud adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya, untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. Lawan pluralisme adalah intoleransi, yakni segenap paksaan dalam hal agama, kepicikan ideologis yang mau memaksakan pandangannya kepada orang lain. Prinsip pluralisme terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasikan karena keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter kolektif bangsa.

HAM

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual.

Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian negara, masyarakat, melainkan karena ia manusia, jadi dari tangan Sang Pencipta. Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, diambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat atau tradisi, dan sebaliknya diancam oleh negara modern. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga

menolak kekerasan dan eksklusivisme suku dan ras. Pelanggaran hak-hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan (impunity).

Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, tetapi juga demi orang lain, dan kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar: keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Oleh karena itu, di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasannya masing-masing. Solidaritas itu dilanggar dengan kasar oleh korupsi. Korupsi bak kanker yang mengerogoti kejujuran, tanggung-jawab, sikap objektif, dan kompetensi orang/kelompok orang yang korup. Korupsi membuat mustahil orang mencapai sesuatu yang bermutu.

Prinsip *kedaulatan rakyat* menyatakan bahwa tak ada manusia, atau sebuah elit, atau sekelompok ideologi, atau sekelompok pendeta/pastor/ulama berhak untuk menentukan dan memaksakan (menuntut dengan ancaman) bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat *plus* prinsip keterwakilan. Jadi, demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.

Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar: pengakuan dan jaminan terhadap HAM. Perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas. Hal kedua adalah kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum (negara hukum demokratis). Maka, kepastian

hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang.

Keadilan Sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan baik apa pun akan kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan sosial mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian; bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling-paling bisa *survive* di hari berikutnya.

Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, dan agama-agama tertentu. Keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa ketidakadilan-ketidakadilan itu bersifat struktural, bukan pertama-pertama individual. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil orang-orang tertentu (misalnya para pemimpin), tetapi dalam struktur-struktur politik/ekonomi/sosial/budaya/ideologis. Struktur-struktur itu hanya dapat dibongkar dengan tekanan dari bawah dan tidak hanya dengan kehendak baik dari atas. Ketidakadilan struktural paling gawat sekarang adalah sebagian besar melingkupi kemiskinan. Ketidakadilan struktur lain adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku, dan budaya.

4. Teori Struktural Fungsional

Pada tahun 1956, tiga tahun setelah David Easton meluncurkan karyanya *The Political System* (1953), Gabriel A. Almond menerapkan teori sistem tersebut atas sistem politik suatu bangsa sebagai bentuk metode *trial and error* layaknya

sebuah teori. Namun, Almond melakukan sejumlah modifikasi atas teori Easton. Jika Easton membangun suatu *grand theory*, maka Almond membangun suatu *middle-range theory*. Secara umum, teori sistem yang dibangun Almond terdiri atas tiga tahap.

Tahap 1 : Gabriel A. Almond dalam Comparative Political Systems (1956)

Tipologi sistem politik Almond pertama kali diajukan pada tahun 1956. Perhatiannya pada tiga asumsi.

1. Sistem menandai totalitas interaksi di antara unit-unitnya serta keseimbangan di dalam sistem selalu berubah.
2. Hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta peran yang dijalankannya.
3. Budaya politik adalah kecenderungan utama dalam sistem politik, di mana budaya inilah yang membedakan satu sistem politik dengan sistem politik lain.

Tahap 2 : Gabriel A. Almond dan James Coleman dalam The Politics of Developing Areas (1960)

Dalam tahap dua ini, Almond berusaha menghindari keterjebakan analisis sistem politik dari kontitusi/lembaga politik formal menjadi ke arah struktur serta fungsi yang dijalankan setiap unit dalam sistem politik. Fungsi menggantikan konsep power, sementara struktur menggantikan konsep lembaga politik formal.

Dalam tahap dua ini pula, Almond menandakan bahwa sistem politik memiliki empat karakteristik yang bersifat universal. Karakteristik ini dapat berlaku di negara manapun. Keempat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. *All political systems have political structures* (setiap sistem politik punya struktur-struktur politik).

2. *The same functions are performed in all political systems* (fungsi-fungsi yang sama dapat ditemui di setiap sistem politik).
3. *All political structure ... is multi-functional* (setiap struktur politik ... bersifat multifungsi).
4. *All political systems are mixed in the cultural sense* (setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik masing-masing).

Setelah mengajukan keempat asumsi dasar, Almond memodifikasi input serta output yang dimaksudkan David Easton. Rincian Almond ini menjelaskan fungsi-fungsi input serta output Easton yang cukup abstrak tersebut. Bagi Almond, secara fungsional setiap sistem politik memiliki fungsi-fungsi input serta output, yang rinciannya sebagai berikut ini.

Fungsi Input terdiri atas:

Sosialisasi dan rekrutmen politik artikulasi kepentingan agregasi (pengelompokan) kepentingan komunikasi politik

Fungsi output terdiri atas:

Sosialisasi dan rekrutmen politik meliputi rekrutmen individu dari aneka kelas masyarakat, etnik, kelompok, dan sejenisnya untuk masuk ke dalam partai politik, birokrasi, dan sebagainya. Artikulasi kepentingan merupakan ekspresi kepentingan politik dan tuntutan untuk melakukan tindakan. Pengelompokan kepentingan merupakan penyatuan tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang diartikulasikan oleh partai politik, kelompok kepentingan, dan entitas politik lainnya. Komunikasi politik melayani proses komunikasi di antara seluruh entitas politik yang berkepentingan sebab baik sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, dan agregasi kepentingan semua disuarakan melalui proses komunikasi politik.

Pada level fungsi output, proses yang berlangsung adalah dalam konteks pemisahan kekuasaan trias politika menurut Montesquieu. Pembuatan peraturan dilakukan oleh lembaga legislatif, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga eksekutif, sementara pengawasan dilakukan oleh lembaga yudikatif.

Penjelasan mengenai entitas politik yang melakukan seluruh proses pada fungsi input adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.1: Fungsi Input dan Output

FUNGSI INPUT	STRUKTUR
Sosialisasi dan Rekrutmen politik	(sosialisasi: keluarga sekolah, tempat kerja, lembaga pemerintah); (rekrutmen: parpol, LSM, birokrasi negara)
Artikulasi kepentingan	Individu, LSM, mahasiswa
Agregasi kepentingan	Parpol, kelompok kepentingan, kelompok penekan
Komunikasi politik	Pers, lembaga pemerintah, parpol
FUNGSI OUTPUT	STRUKTUR
Pembuatan peraturan	Legislatif
Pelaksanaan peraturan	Eksekutif
Pengawasan pembuatan dan pelaksanaan peraturan	Yudikatif

Menurut Ronald H. Chilcote, pandangan Almond mengenai sistem politik bercorak dualistik. Artinya, Almond selalu menganggap ada dua bentuk yang bertolak belakang dari sebuah sistem politik, misalnya tradisional vs. modern, agraris vs. industri, maju dan terbelakang, dan sejenisnya. Almond menganggap bahwa sistem politik yang belum berkembang ditandai oleh gaya pembagian kerja yang bercorak tradisional, bersifat partikularistik, afektif, dan turun-temurun, sementara sistem politik yang sudah maju ditandai oleh spesifikasi kerja yang rasional, universalis, netral afektif, dan bersifat prestasi atau pencapaian (achievement).

Setelah merevisi teori sistem politik dari David Easton, Almond meringkas pola pikir sistem politiknya ke dalam skema berikut :



Melalui skema di atas, Almond membagi ada tiga level dalam sistem politik. Level pertama terdiri atas enam fungsi konversi yaitu: artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, pembuatan peraturan, pelaksanaan peraturan, dan pengawasan peraturan. Fungsi-fungsi ini berhubungan dengan tuntutan dan dukungan pada input serta keputusan dan tindakan pada output.

Level kedua dari aktivitas sistem politik terletak pada fungsi-fungsi kemampuan, yaitu regulasi, ekstraksi, distribusi, simbolik, dan respon. Almond menyebutkan bahwa di negara-negara demokratis, output dari kemampuan regulasi, ekstraksi, dan distribusi lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok sehingga masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi. Sementara itu, pada sistem totaliter, output kurang responsif pada tuntutan, perilaku regulatif bercorak paksaan, seraya lebih mengekstraksi secara maksimal sumber daya dari masyarakatnya. Sementara itu, yang dimaksud Almond dengan kemampuan simbolik adalah kemampuan suatu sistem politik untuk menonjolkan diri di lingkungan internasional.

Level ketiga ditempati oleh fungsi *maintenance* (pemeliharaan) dan adaptasi. Kedua fungsi ini ditempati oleh sosialisasi dan rekrutmen politik. Teori sistem politik Gabriel A. Almond ini kiranya lebih memperjelas maksud dari David Easton dalam menjelaskan kinerja suatu sistem politik. Melalui Gabriel A. Almond, pendekatan struktural fungsional mulai mendapat tempat di dalam analisis kehidupan politik suatu negara.

Pada teori sosiologi dan politik, yang menonjol adalah David Easton dan Talcott Parsons. Parsons melahirkan Teori Sistem yang berkaitan dengan perspektif *struktural fungsional*. Dalam pandangan ini, sejumlah kebutuhan harus dipenuhi kalau suatu masyarakat ingin hidup. Kebutuhan tersebut adalah untuk penyesuaian, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola-pola. Oleh karena itu, perlu empat subsistem dalam masyarakat, yaitu ekonomi, politik, kebudayaan, dan sosialisasi (melalui keluarga dan sistem pendidikan). Struktural-fungsional berpegang bahwa sebuah struktur keluarga membentuk kemampuannya untuk berfungsi secara efektif, dan bahwa sebuah keluarga inti tersusun dari seorang laki-laki pencari nafkah dan wanita ibu rumah tangga adalah yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan anggota dan ekonomi industri baru (Parsons & Bales, 1955). Berdasarkan teori struktural fungsional oleh Easton dan Parsons, Almond selanjutnya mengadaptasi teori tersebut ke dalam sistem politik sehingga teori tersebut dapat pula diterapkan ke dalam pola-pola kehidupan berpolitik.

B. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengenai partai politik pada pemilu 2009 telah dibahas oleh beberapa kajian. Salah satu kajian mengenai partai politik telah dilakukan oleh George Towar Iqbal Tawakkal yang berjudul *Peran Partai Politik dalam Mobilisasi*

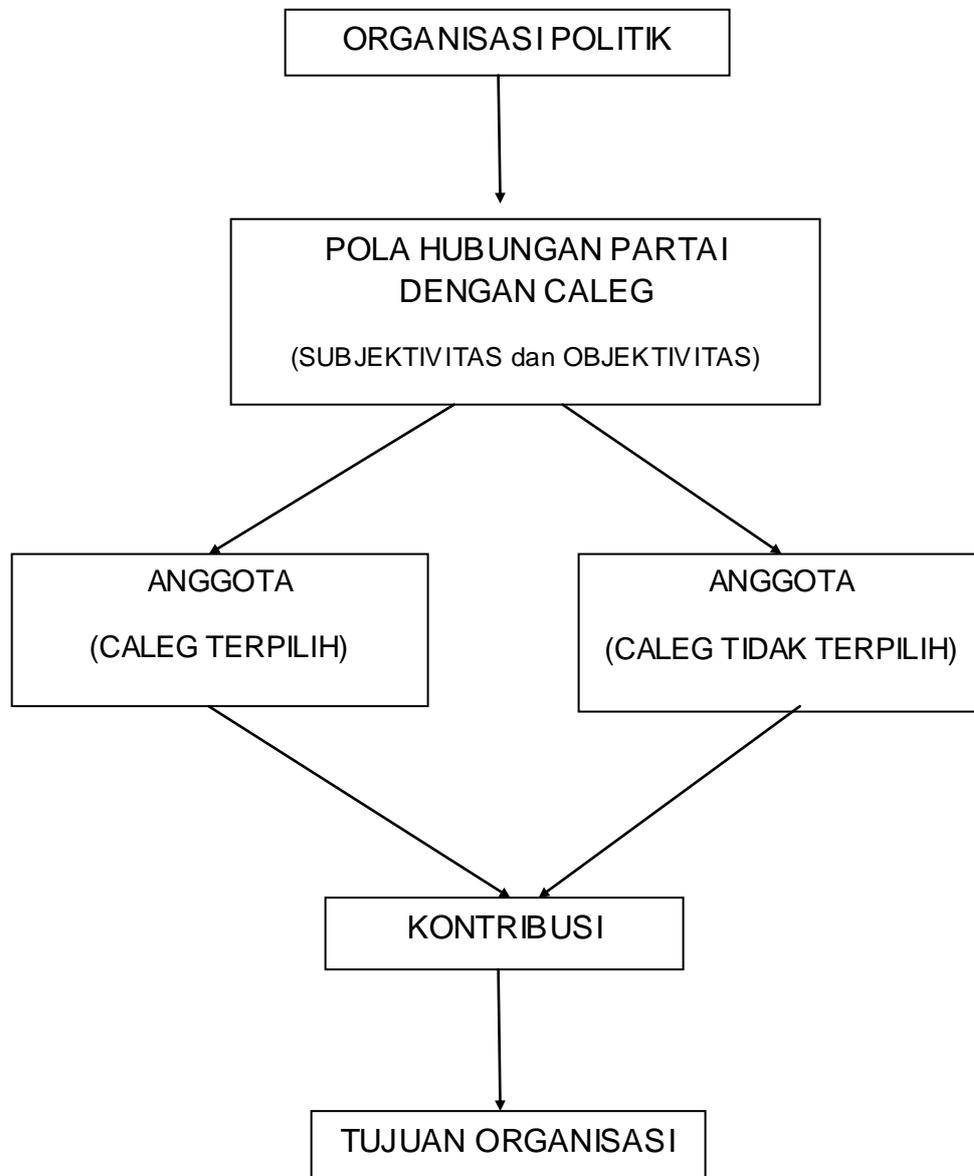
Pemilih Studi Kegagalan Parpol pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Demak 2009 dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Akan tetapi, penelitian George tersebut berbeda dengan penelitian ini karena di sini akan dibahas mengenai pola hubungan caleg dengan ketua partai atau pengurus partai. Sementara, George membahas mengenai mobilisasi massa dalam pemilu 2009.

C. Kerangka Pikir

Golkar merupakan salah satu partai politik yang berbentuk organisasi besar dengan struktur kepengurusan mulai dari kecamatan sampai tingkat nasional. Untuk menjaga kelangsungan organisasi, Partai Golkar selalu merekrut kader-kader yang berkualitas. Tentu sebagai partai besar di Indonesia, Partai Golkar memiliki perangkat tersendiri dalam merekrut calon anggota atau calon kadernya. Penelitian mencoba melihat mekanisme perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu 2009 di Kabupaten Takalar. Dalam pelaksanaan aturan perekrutan tersebut, terdapat dua pola hubungan yang terbentuk antara caleg dengan partai, yakni subjektivitas dan objektivitas.

Setelah proses pencalonan anggota legislatif, tentu ada caleg yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Mereka memiliki kontribusi tersendiri terhadap partai demi tercapainya tujuan organisasi partai.

Skema Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Organisasi politik adalah organisasi partai politik, yakni Partai Golkar Kabupaten Takalar.
2. Pola hubungan adalah mekanisme perekrutan caleg yang terdiri atas subjektivitas dan objektivitas.
3. Caleg terpilih adalah anggota partai atau anggota tertentu yang direkrut melalui pola-pola hubungan tertentu, yang jumlah pemerolehan suaranya mendapat satu jatah kursi di DPRD.
4. Caleg tidak terpilih adalah anggota atau anggota tertentu yang direkrut melalui pola-pola hubungan tertentu tetapi jumlah pemerolehan suaranya tidak bisa mendapatkan jatah kursi di DPRD.
5. Kontribusi adalah sumbangsih caleg atau anggota terhadap partai
6. Tujuan adalah program-program yang direncanakan partai.

BAB III

METODE PENELITIAN